

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hukum dan Peradilan*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1995.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jilid I, Cet. 9, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Hamzah Halim & Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah : Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- _____, *Hak Uji Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 112-113.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Kerja Sama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- _____, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cet. 2, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012.
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cet. I, Bandung: Penerbit Nuansa, 2010.
- Maftuh Effendi, *Kewenangan Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Mahkamah Agung: Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung Tahun 2005-2011*, Jakarta: Puslitbangkumdil Balitbang MA RI, 2005.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Cet. 16, Jakarta: Penerbit Kanisius, 2015.
- Moh. Kusnardi, dan Ibrahim Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Sinar Bakti, 1988.
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cet. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara (Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara)*, Edisi Baru, Jakarta: Jala Puspita Aksara Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sri Soemantri, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Ed. Revisi, Bandung: Penerbit Alumni, 1997.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ed. revisi, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

B. On-Line Information Via Internet

M. Nur Sholikin, "Transparansi dan Akuntabilitas Sidang Judicial Review di MA", (Online). Tersedia di <https://www.selasar.com/politik/transparansi-dan-akuntabilitas-sidang-judicial-review-di-ma-> (25 Mei 2015).

Suripto, "Wewenang Mahkamah Kontitusi Menguji Undang-Undang (Judicial Review)", (Online). Tersedia di, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=518 (17 April 2012).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 8, TLN RI Nomor 4358.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Mahkamah Agung, UU No. 14 tahun 1985, LN RI Nomor 73 Tahun 1985, TLN RI Tahun 1985 Nomor 3316.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 5 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 9, TLN RI Nomor 4359.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 157, TLN RI Nomor 5076.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 3 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 3, TLN RI Nomor 4958.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234,

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 10 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN RI Nomor 4389,

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Susunan Kejaksaan Agung, UU No. 7 Tahun 1947.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan, UU No. 19 Tahun 1948,

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, UU No. 7 Tahun 1950.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 19 Tahun 1964, LN RI Tahun 1964 Nomor 107, TLN RI Tahun 1964 Nomor 2699.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1970, LN RI Tahun 1970 Nomor 74, TLN RI Tahun 1970 Nomor 2951.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN RI Nomor 4316 Tahun 2003.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 8 Tahun 2011, LN RI Tahun 2011 Nomor 70, TLN RI Nomor 5226,

Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950, UUDS Tahun 1950,

Indonesia, Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, TAP MPR No. III/MPR/1978.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966,

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR No. III/MPR/2000.

Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945, Kepres No. 150 Tahun 1959, LN RI Tahun 1959 Nomor 75.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hak Uji Materiil, Perma No. 1 Tahun 1993.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hak Uji Materiil, Perma No. 1 Tahun 1999.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hak Uji Materiil, Perma No. 1 Tahun 2004.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hak Uji Materiil, Perma No. 1 Tahun 2011.